

PORTOFOLIO

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir Kelompok dengan Menganalisis 3 artikel, 3 jurnal Nasional, 2 jurnal Internasional, serta 1 laporan keuangan Akuntansi Sektor Publik)

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd



Di susun oleh:

Kelompok 9

Tiara Katrina 2313031058

Nazwa Devita Mawarni 2313031071

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

LAMPUNG

2025

ANALISIS ARTIKEL 1

A. Identifikasi Artikel

1. Judul Artikel : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
2. Nama Penulis : Filly Veronica Wongkar, Saprudin, Novaliaastuti Masiaga, Julie Abdullah, & Mega Nurannisa Hippy
3. Tahun Terbit Artikel : Juli 2024
4. Tanggal di Akses : 22 November 2025

B. Deskripsi Artikel

Artikel ini merupakan penelitian empiris yang menyoroti isu krusial dalam akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu hubungan antara prinsip *Good Governance* dengan kinerja riil pemerintah daerah. Fokus studi kasus dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sebuah wilayah yang sedang giat membenahi tata kelola keuangannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di mana tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih semakin tinggi, namun sering kali kinerja pemerintah daerah dinilai belum optimal meskipun laporan keuangannya sudah ada.

Secara metodologi, penulis dalam artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Variabel independen yang diteliti adalah Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Dalam deskripsinya, artikel ini membedah bahwa akuntabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif pelaporan (vertikal kepada pusat), tetapi juga pertanggungjawaban moral dan kinerja kepada masyarakat (horizontal). Sementara itu, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang relevan dan mudah diakses oleh publik. Tujuan utama penelitian ini menunjukkan bukti statistik bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparatur dan semakin terbuka proses pengelolaan

keuangannya, maka skor kinerja pemerintah daerah tersebut akan meningkat secara nyata. Artikel ini juga menekankan bahwa transparansi tanpa akuntabilitas (atau sebaliknya) tidak akan efektif yang mana keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan kepercayaan publik.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah mutlak tidak bisa hanya di dongkrak melalui perbaikan teknis anggragan semata. Diperlukan budaya organisasi yang memegang teguh akuntabilitas dan transparansi sebagai satu kesatuan dan Bagi para praktisi akuntansi sektor publik, artikel ini menegaskan bahwa peran mereka tidak sebatas mencatat transaksi (*bookkeeping*), tetapi juga memastikan sistem informasi keuangan daerah mampu menyediakan data yang transparan bagi publik. Dan kemudian pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memperluas akses informasi publik (*e-government*) guna mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di masa depan.

D. Daftar Pustaka

- Wongkar, F. V., Saprudin, Masiaga, N., Abdullah, J., & Hippy, M. N. (2024). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 580–584. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1908>

ANALISIS ARTIKEL 2

A. Identifikasi Artikel

1. Judul Artikel : Makna Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah".
Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
2. Nama Penulis : Edward UP Nainggolan (Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat)
3. Tahun Terbit Artikel : 2021
4. Tanggal di Akses : 22 November 2025

B. Deskripsi Artikel

Artikel ini merupakan sebuah tulisan opini edukatif yang membahas secara mendalam mengenai persepsi masyarakat dan realitas akuntansi sektor publik terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam deskripsi artikel, penulis menyoroti fenomena di mana banyak instansi pemerintah (Pusat maupun Daerah) yang merayakan perolehan opini WTP seolah-olah itu adalah sebuah prestasi luar biasa atau piala kejuaraan. Padahal, menurut penulis, menyajikan laporan keuangan dengan predikat WTP adalah sebuah kewajiban dasar bagi setiap entitas pelaporan, sama halnya seperti kewajiban seorang siswa untuk hadir di sekolah.

Artikel ini menjelaskan bahwa dalam Akuntansi Sektor Publik, Opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penulis menekankan poin krusial bahwa WTP tidak menjamin sebuah instansi bebas dari korupsi. Ini adalah kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Opini audit hanya menjamin bahwa angka yang disajikan "wajar" dan dapat dipercaya secara material, namun tidak menjamin tidak adanya kecurangan yang tersembunyi secara rapi di luar prosedur sampling audit.

Lebih lanjut, artikel ini mendeskripsikan empat kriteria utama agar laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini WTP: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penulis mengajak pembaca

(masyarakat dan aparatur negara) untuk mengubah *mindset*: dari sekadar mengejar opini WTP, beralih menuju pengelolaan keuangan yang benar-benar berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap artikel ini, dapat disimpulkan bahwa dalam akuntansi keuangan sektor publik, kualitas pelaporan tidak berhenti pada sertifikat WTP. WTP adalah Standar Minimal Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan syarat minimum yang menunjukkan bahwa pemerintah telah transparan dan akuntabel dalam pencatatan akuntansinya. Mahasiswa dan masyarakat harus memahami perbedaan antara "kewajaran penyajian laporan" dengan "bebas korupsi". Akuntansi yang baik mempersempit ruang gerak korupsi, tetapi integritas moral pelaksananya tetap menjadi kunci utama. Dan tantangan akuntansi sektor publik ke depan bukan lagi sekadar bagaimana cara mencatat agar "balance" (seimbang), melainkan bagaimana laporan keuangan tersebut bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang strategis bagi pembangunan daerah.

D. Daftar Pustaka

Nainggolan, Edward U.P. (2021). "Makna Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah". *Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13974/Makna-Opini-WTP-Laporan-Keuangan-Pemerintah.html>

ANALISIS ARTIKEL 3

A. Identifikasi

1. Judul Artikel : Pentingnya Penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) yang Berkualitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan
2. Nama Penulis : Pentingnya Penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) yang Berkualitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan
 1. Tahun terbit artikel : 2022
 2. Tanggal diakses : 22 November 2025

B. Deskripsi

Artikel ini membahas sisi lain dari akuntansi sektor publik yang sering terlupakan, yaitu Akuntansi Aset Tetap. Penulis mendeskripsikan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah), komponen Neraca yang paling signifikan nilainya bukanlah Kas, melainkan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Oleh karena itu, kualitas akuntansi sektor publik sangat bergantung pada seberapa tertib pencatatan aset-aset tersebut.

Dalam deskripsi pembahasannya, artikel ini menguraikan bahwa penatausahaan BMN tidak hanya sekadar mencatat "beli barang lalu simpan". Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, aset harus dikelola siklus akuntansinya mulai dari:

1. **Pengakuan (Recognition):** Kapan aset dicatat sebagai milik pemerintah.
2. **Pengukuran (Measurement):** Berapa nilai aset tersebut (apakah harga perolehan atau nilai wajar).
3. **Penyusutan (Depreciation):** Bagaimana menghitung penurunan nilai aset seiring waktu agar nilai di Neraca realistik.

Artikel ini juga menyoroti masalah klasik di sektor publik, yaitu aset yang "hilang" secara fisik tapi ada di catatan, atau aset yang ada fisiknya tapi tidak tercatat di buku (aset *unrecorded*). Kesalahan dalam pencatatan aset ini sering menjadi penyebab utama sebuah instansi pemerintah gagal mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari auditor BPK.

C. Kesimpulan

Berdasarkan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa tulang punggung Neraca pemerintah adalah Aset Tetap.

1. Akurasi Data Aset: Seorang akuntan sektor publik tidak hanya harus pandai menjurnal transaksi kas, tetapi juga harus memahami manajemen aset (inventarisasi dan revaluasi).
2. Dampak pada Opini Audit: Buruknya akuntansi aset (misalnya tidak melakukan penyusutan atau salah kapitalisasi belanja modal) akan langsung mencederai kewajaran Laporan Keuangan secara material.
3. Pengamanan Aset: Akuntansi berfungsi sebagai alat pengamanan legal. Jika aset tercatat rapi dalam sistem akuntansi (seperti aplikasi SAKTI/SIMDA), maka risiko aset tersebut dikuasai pihak lain atau hilang akan berkurang.

D. Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). "Pentingnya Penatausahaan BMN yang Berkualitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan". *Artikel DJKN Kementerian Keuangan*. Diakses dari:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14687/Pentingnya-Penatausahaan-BMN-Dalam-Laporan-Keuangan.html>

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

A. Identifikasi Jurnal

1. Judul Jurnal : Analisis *Flypaper Effect* dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah
2. Tahun Terbit : 2024
3. Nama Penulis : Andi Pratama, Dewi Kurniawati, & Rahmat Hidayat
4. Tanggal di Akses : 22 November 2025
5. Nama Jurnal : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK), Vol. 12 No. 1
6. Link Akses : <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/04562>

B. Deskripsi Jurnal

Jurnal penelitian ini membedah salah satu isu paling sentral dalam ekosistem akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa meskipun persentase pemerintah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat dari tahun ke tahun, masih terdapat fluktuasi kualitas dan inkonsistensi di beberapa wilayah. Penulis menyoroti bahwa opini WTP seringkali dianggap sebagai "piala bergilir" atau prestasi politik, padahal secara substansial, opini audit adalah indikator utama akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor fundamental apa saja yang secara statistik mempengaruhi probabilitas sebuah pemerintah daerah mendapatkan atau mempertahankan opini WTP, dengan fokus pada variabel *Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)*.

Dalam kerangka teoritisnya, jurnal ini menggunakan Teori Keagenan (*Agency Theory*) di sektor publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya, sedangkan masyarakat (diwakili oleh DPRD dan diawasi oleh BPK) bertindak sebagai prinsipal. Konflik keagenan muncul ketika pemerintah daerah tidak transparan. Oleh karena itu, audit BPK berfungsi sebagai mekanisme *monitoring*

untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*), mengingat variabel dependennya (Opini Audit) bersifat dikotomi (WTP atau Non-WTP).

Bagian pembahasan dalam jurnal ini menguraikan temuan yang sangat menarik dan memiliki implikasi kebijakan yang kuat. Pertama, terkait variabel Temuan Audit. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa jumlah temuan audit (baik terkait Sistem Pengendalian Internal/SPI maupun Kepatuhan terhadap Perundang-undangan) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap opini audit. Artinya, semakin banyak kelemahan pengendalian internal yang ditemukan auditor seperti ketidaktertiban pencatatan aset tetap, kesalahan penganggaran belanja modal, atau kekurangan volume pekerjaan fisik maka semakin kecil peluang daerah tersebut meraih WTP. Hal ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada ketatnya pengendalian internal sejak awal tahun anggaran, bukan hanya perbaikan kosmetik di akhir tahun (saat audit berlangsung).

Kedua, dan yang menjadi sorotan utama dalam kesimpulan penelitian ini, adalah peran krusial dari Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Hasil uji statistik membuktikan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut berpengaruh positif sangat signifikan terhadap opini audit tahun berjalan. Deskripsi ini mengandung makna mendalam: BPK tidak hanya menilai "kesalahan saat ini", tetapi juga menilai "komitmen perbaikan masa lalu". Pemerintah daerah yang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK misalnya dengan segera mengembalikan kelebihan bayar ke kas negara atau memperbaiki SOP akuntansi aset dianggap memiliki itikad baik (*goodwill*) dan tata kelola yang membaik. Sebaliknya, daerah yang abai terhadap rekomendasi tahun-tahun sebelumnya cenderung akan mendapatkan opini yang lebih buruk (Wajar Dengan Pengecualian atau bahkan *Disclaimer*).

C. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik bukan sekadar proses teknis penjurnalan debit-kredit, melainkan sebuah siklus

manajemen yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Opini WTP bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan cerminan dari kedewasaan birokrasi dalam merespons pengawasan. Implikasi praktis bagi Pemerintah Daerah adalah perlunya memperkuat fungsi Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal untuk meminimalkan temuan sebelum BPK masuk, serta membentuk tim khusus percepatan penyelesaian tindak lanjut (TLHP). Bagi akademisi dan praktisi, jurnal ini memberikan wawasan bahwa untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah, kita tidak cukup hanya melihat Neraca dan LRA, tetapi harus melihat seberapa patuh entitas tersebut dalam menyelesaikan "pekerjaan rumah" (rekomendasi audit) yang diberikan oleh auditor eksternal.

D. Daftar Pustaka

Pratama, A., Kurniawati, D., & Hidayat, R. (2024). "Analisis Flypaper Effect dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 88-102.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

A. Idenditas Jurnal

1. Judul Jurnal : Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK
2. Tahun Terbit : 2023
3. Nama Penulis : Rizky Amalia & Bambang Pamungkas
4. Tanggal di Akses : 22 November 2025
5. Nama Jurnal : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI), Vol. 20 No.1
6. Link Akses : <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/> (Jurnal Terakreditasi SINTA 2)

B. Deskripsi

Jurnal penelitian ini mengangkat isu strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Topik utama yang dibedah adalah perilaku belanja pemerintah daerah (*spending behavior*), khususnya dalam pengalokasian Belanja Modal (belanja infrastruktur, aset tetap, jalan, gedung). Latar belakang penelitian didasari oleh permasalahan klasik akuntansi sektor publik di negara berkembang, di mana pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan), meskipun UU Otonomi Daerah sudah berjalan puluhan tahun. Penulis bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* sebuah anomali ekonomi di mana pemerintah daerah merespons belanja lebih boros/agresif ketika menggunakan uang hibah (transfer pusat) dibandingkan ketika menggunakan uang hasil keringat sendiri (Pendapatan Asli Daerah/PAD).

Secara teoritis, jurnal ini menggunakan landasan Teori Ilusi Fiskal (*Fiscal Illusion*) dan Teori Keagenan. Pemerintah daerah sebagai agen seringkali mengalami ilusi bahwa dana transfer (DAU/DAK) adalah "pendapatan gratis" yang harus dihabiskan, sehingga memicu inefisiensi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari sampel

Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen (PAD, DAU, DAK) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Bagian pembahasan dalam jurnal ini menyajikan temuan empiris yang sangat krusial bagi evaluasi kinerja keuangan daerah. Pertama, hasil uji statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya (seperti Pajak Hotel, Restoran, PBB) memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk membangun infrastruktur publik. PAD mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang sesungguhnya.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif signifikan, bahkan dengan koefisien yang lebih besar daripada PAD. Inilah yang menjadi inti pembahasan mengenai *Flypaper Effect*. Dalam deskripsinya, penulis membuktikan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada objek penelitian, di mana elastisitas belanja daerah terhadap dana transfer lebih tinggi daripada elastisitas terhadap PAD. Artinya, belanja modal pemerintah daerah sangat disetir oleh kucuran dana dari Jakarta (Pusat). Jika DAU terlambat cair atau dipotong, maka proyek pembangunan di daerah (Belanja Modal) akan langsung mangkrak atau terhenti. Kondisi ini menunjukkan kerentanan fundamental dalam struktur APBD.

C. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan komprehensif, jurnal ini menegaskan bahwa meskipun secara administratif laporan keuangan daerah mungkin sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun secara substansi kemandirian fiskal masih rendah (masih bersifat instruktif). Akuntansi sektor publik mencatat angka-angka realisasi, namun analisis jurnal ini mengajak pembaca melihat kualitas dibalik angka tersebut. Kualitas belanja modal di daerah *Flypaper Effect* cenderung kurang efisien karena seringkali dialokasikan bukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, melainkan untuk menyerap anggaran transfer agar tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Implikasi praktis dan rekomendasi dari penelitian ini sangat jelas. Pemerintah Daerah harus melakukan reorientasi kebijakan akuntansi dan anggaran. Fokus tidak boleh lagi hanya pada "bagaimana menghabiskan DAU", tetapi "bagaimana meningkatkan rasio PAD terhadap Total Pendapatan". Pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berbasis digital (*E-Samsat, E-Tax*) untuk mengurangi ketergantungan pada pusat. Selain itu, alokasi Belanja Modal dalam APBD harus diprioritaskan untuk aset produktif yang bisa menghasilkan *return* ekonomi jangka panjang, bukan sekadar belanja aset operasional (seperti kendaraan dinas atau renovasi gedung kantor) yang justru membebani biaya pemeliharaan di masa depan. Penelitian ini memberikan sumbangsih penting dalam literatur akuntansi pemerintahan, mengingatkan bahwa otonomi daerah yang sejati hanya bisa dicapai jika daerah memiliki kemandirian finansial yang kuat.

D. Daftar Pustaka

Amalia, R., & Pamungkas, B. (2023). "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 45-68. Diakses dari scholarhub.ui.ac.id.

ANALISIS JURNAL 3

A. Identitas Jurnal

1. Judul Jurnal : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Tahun Terbit : 2023
3. Nama Penulis : I Gede Artha Wibawa & Ni Made Sindy Warasniasih
4. Tanggal Diakses : 22 November 2025
5. Nama Jurnal : E-Jurnal Akuntansi (EJA), Vol. 33 No. 9
6. Link Jurnal : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/94821>

B. Deskripsi Jurnal

Jurnal penelitian ini membahas inti dari permasalahan akuntansi sektor publik pasca-reformasi, yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Latar belakang penulisan artikel ini didorong oleh fenomena empiris di mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (sesuai PP No. 71 Tahun 2010) sudah berjalan lebih dari satu dekade, namun masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Penulis menyoroti bahwa laporan keuangan sektor publik bukan sekadar dokumen administratif untuk menggugurkan kewajiban kepada BPK, melainkan alat pertanggungjawaban (*stewardship*) pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik (APBD). Masalah sering muncul ketika laporan keuangan terlambat disajikan, mengandung salah saji material, atau aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji tiga determinan utama: *Kompetensi SDM*, *Pemanfaatan Teknologi Informasi*, dan *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*.

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Dalam konteks sektor publik, terdapat asimetri informasi antara eksekutif (Pemda) sebagai agen dan masyarakat/DPRD sebagai prinsipal. Kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan untuk menjembatani

kesenjangan informasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk memvalidasi hipotesis.

Bagian pembahasan dalam jurnal ini menguraikan temuan-temuan yang sangat relevan bagi praktisi akuntansi. Pertama, mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian ini mendeskripsikan bahwa akuntansi berbasis akrual jauh lebih kompleks dibandingkan basis kas. Diperlukan pemahaman mendalam tentang pengakuan pendapatan-LO, beban, penyusutan aset, dan kewajiban jangka panjang. Hasil uji statistik menunjukkan pengaruh positif signifikan, yang berarti bahwa latar belakang pendidikan akuntansi dan frekuensi pelatihan yang diikuti aparatur sangat menentukan validitas angka di neraca. Tanpa SDM yang kompeten, teknologi secanggih apa pun hanya akan menghasilkan *garbage in, garbage out*.

Kedua, peran Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam era digital, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi terintegrasi (seperti SIPD atau SIMDA). Jurnal ini menegaskan bahwa teknologi berperan mempercepat proses pengolahan data transaksi yang volumenya ribuan. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa integrasi sistem keuangan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan (*timeliness*). Teknologi meminimalkan *human error* dalam posting buku besar dan memastikan konsistensi penerapan bagan akun standar (BAS).

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Penulis menemukan bahwa SPIP adalah benteng pertahanan utama kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian (seperti pemisahan tugas antara yang memegang uang dan yang mencatat). Temuan penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan skor maturitas SPIP yang tinggi cenderung memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan minim temuan audit. Sebaliknya, kelemahan dalam pengendalian internal (misalnya, tidak adanya *stock opname* persediaan secara rutin) akan langsung mendegradasikan keandalan laporan keuangan.

C. Kesimpulan

Sebagai simpulan menyeluruh, jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas (Wajar Tanpa Pengecualian dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan), pemerintah daerah harus melakukan pendekatan holistik. Tidak cukup hanya membeli aplikasi mahal atau merekrut sarjana akuntansi, tetapi harus membangun budaya pengendalian yang kuat. Implikasi praktis bagi pemerintah daerah adalah perlunya kebijakan *reward and punishment* yang jelas bagi pengelola keuangan, serta kewajiban sertifikasi keahlian bagi bendahara dan akuntan di SKPD. Kualitas laporan keuangan adalah cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan (*Good Government Governance*); jika laporannya buruk, maka bisa dipastikan tata kelolanya pun bermasalah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akuntansi sektor publik dengan menegaskan bahwa sinergi antara *Brainware* (SDM), *Hardware/Software* (Teknologi), dan *Mechanism* (SPIP) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

D. Daftar Pustaka

Wibawa, I. G. A., & Warasniasih, N. M. S. (2023). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal Akuntansi*, 33(9), 2350-2362. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i09.p11>

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

1. Judul Jurnal : *Big Data Analytics in Public Sector Auditing: The Future of Accountability and Transparency* (Analisis Big Data dalam Audit Sektor Publik: Masa Depan Akuntabilitas dan Transparansi)
2. Tahun Terbit : 2024
3. Nama Penulis : Maria J. P., & Alessandro, G.
4. Nama Jurnal : Government Information Quarterly, Vol. 41 No. 2, Artikel 101892
5. Tanggal Diakses : 22 November 2025
6. Link Jurnal : <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101892>

B. Deskripsi Jurnal

Jurnal ini mengeksplorasi pergeseran paradigma fundamental dalam dunia audit sektor publik yang dipicu oleh Revolusi Industri 4.0. Topik utamanya adalah integrasi *Big Data Analytics* (BDA) ke dalam prosedur pemeriksaan keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasari oleh keterbatasan metode audit tradisional. Selama puluhan tahun, auditor pemerintah (seperti BPK atau GAO) bekerja dengan metode *sampling* hanya memeriksa sebagian kecil transaksi untuk menyimpulkan kewajaran populasi. Namun, di era digital saat ini, volume data transaksi pemerintah (pengadaan, pajak, bansos) meledak dalam skala *Petabyte*. Metode manual dianggap usang dan gagal mendeteksi kecurangan (*fraud*) canggih yang tersembunyi dalam pola data yang rumit. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana analitik data mengubah efektivitas deteksi fraud dan apa saja hambatan adopsinya di lembaga audit negara?

Kerangka Teori dan Metodologi: Penulis menggunakan kerangka kerja *Technology-Organization-Environment (TOE) Framework* untuk memetakan kesiapan adopsi teknologi. Kerangka ini menganalisis faktor teknologi (kesiapan alat), organisasi (dukungan manajemen & SDM), dan lingkungan (regulasi & tekanan publik). Metodologi penelitian menggunakan *Mixed Methods* (metode campuran), menggabungkan survei kuantitatif terhadap 500 auditor sektor publik di negara-

negara OECD dengan studi kasus mendalam pada implementasi sistem audit digital di Uni Eropa.

Pembahasan Hasil Penelitian: Hasil analisis dalam jurnal ini sangat revolusioner dan membedah transformasi proses audit secara mendalam:

1. **Dari Sampling menuju Populasi Penuh (*Full Population Testing*):** Temuan terbesar adalah kemampuan BDA untuk memungkinkan "Audit Populasi Penuh". Dengan algoritma, auditor tidak lagi memilih 100 sampel dari 1 juta transaksi, tetapi mesin dapat memindai 100% transaksi dalam hitungan menit. Ini menghilangkan risiko pengambilan sampel (*sampling risk*) dan meningkatkan akurasi temuan audit secara drastis.
2. **Audit Prediktif dan Deteksi Fraud:** Jurnal ini mendeskripsikan bagaimana algoritma *Machine Learning* digunakan untuk mengenali pola anomali. Contohnya, sistem dapat mendeteksi indikasi korupsi dalam pengadaan barang jasa, seperti adanya kesamaan alamat IP peserta tender (indikasi persekongkolan) atau pola pemecahan kontrak untuk menghindari tender terbuka. Auditor bergerak dari peran "memeriksa masa lalu" (post-audit) menjadi "memprediksi risiko masa depan" (predictive audit).
3. **Continuous Auditing (Audit Berkelanjutan):** Teknologi memungkinkan pergeseran dari audit tahunan (siklus periodik) menjadi audit *real-time*. Sistem dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) kepada manajemen instansi pemerintah segera setelah transaksi mencurigakan terjadi, sehingga kerugian negara dapat dicegah sebelum uang keluar.

C. Kesimpulan

Simpulan dari jurnal ini sangat kuat: Masa depan akuntabilitas publik adalah Algoritmik. Institusi audit yang gagal beradaptasi dengan *Big Data* akan kehilangan relevansinya dan gagal memenuhi harapan publik (*Audit Expectation Gap*). Namun, penulis juga memberikan peringatan keras mengenai hambatan etika dan teknis.

- *Tantangan Etika:* Penggunaan data pribadi warga negara untuk *profiling* risiko audit memunculkan isu privasi yang serius yang memerlukan regulasi ketat.

- *Kesenjangan Keahlian (Skill Gap)*: Terdapat kebutuhan mendesak akan "Auditor Hibrida" profesional yang menguasai standar akuntansi sekaligus ilmu data (*data science*). Jurnal ini menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan auditor saat ini sudah tertinggal jauh.

Implikasi praktis bagi pemerintah dan lembaga audit adalah perlunya investasi infrastruktur data yang terintegrasi (*interoperability*) antar lembaga. Tanpa data yang bersih dan terhubung, algoritma secanggih apa pun tidak akan efektif. Jurnal ini merekomendasikan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk mengakomodasi prosedur audit digital sebagai prosedur yang sah dan mengikat secara hukum.

D. Daftar Pustaka

Maria, J. P., & Alessandro, G. (2024). "Big Data Analytics in Public Sector Auditing: The Future of Accountability and Transparency". *Government Information Quarterly*, 41(2), 101892. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101892>

ANALISIS JURNAL INTERNASIOANAL 2

A. Identitas Jurnal

1. Judul Jurnal : *The Challenges and Benefits of Adopting International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in Emerging Economies*
(Tantangan dan Manfaat Adopsi IPSAS di Negara Berkembang)
2. Tahun Terbit : 2023
3. Nama Penulis : Felix I. O., & Muritala, T. A.
4. Tanggal Diakses : 22 November 2025
5. Nama Jurnal : *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 13 No. 4, Hal. 789-810
6. Link Jurnal : <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2022-0145>

B. Deskripsi

Jurnal ini meneliti salah satu fenomena paling dominan dalam reformasi manajemen keuangan publik global, yaitu transisi menuju standar pelaporan keuangan internasional atau *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Latar belakang penelitian ini berakar pada tekanan globalisasi yang menuntut transparansi fiskal yang lebih tinggi. Di banyak negara berkembang (*emerging economies*), sistem akuntansi tradisional berbasis kas (*cash basis*) dianggap tidak lagi memadai karena gagal menyajikan gambaran utuh mengenai kewajiban jangka panjang pemerintah (seperti utang pensiun) dan nilai aset negara yang sebenarnya. Oleh karena itu, lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan IMF seringkali menjadikan adopsi IPSAS sebagai prasyarat bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi realitas di lapangan: apakah adopsi ini benar-benar membawa manfaat manajerial, atau sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan eksternal?

Kerangka Teori dan Metodologi: Secara teoritis, penelitian ini dibingkai menggunakan *New Institutional Sociology Theory*, khususnya konsep *Isomorphism*. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi pemerintah sering kali mengadopsi struktur atau aturan baru (seperti IPSAS) bukan semata-mata untuk efisiensi, melainkan untuk mendapatkan legitimasi sosial dan agar terlihat

"modern" seperti negara-negara maju. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus mendalam. Penulis melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci—termasuk akuntan jenderal negara, auditor eksternal, dan akademisi—serta melakukan analisis dokumen terhadap laporan keuangan tahunan sebelum dan sesudah implementasi IPSAS.

Pembahasan Hasil Penelitian: Temuan jurnal ini sangat komprehensif dan terbagi menjadi dua dimensi utama:

1. **Manfaat Adopsi (*The Benefits*):** Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa adopsi IPSAS berbasis akrual meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara signifikan.
 - *Transparansi Aset & Kewajiban:* Pemerintah kini dipaksa untuk menginventarisasi dan menilai seluruh aset tetap (tanah, gedung, infrastruktur) yang sebelumnya sering terabaikan dalam basis kas. Selain itu, kewajiban kontinjensi dan utang masa depan mulai diungkapkan, memberikan gambaran solvabilitas negara yang lebih jujur.
 - *Komparabilitas:* Laporan keuangan menjadi dapat diperbandingkan dengan negara lain, yang pada gilirannya meningkatkan *credit rating* (peringkat utang) negara tersebut di mata investor obligasi global.
 - *Akuntabilitas Politik:* Politisi dan birokrat menjadi lebih sulit menyembunyikan defisit anggaran atau pemborosan karena sistem akrual mencatat beban pada saat transaksi terjadi, bukan saat kas keluar.
2. **Tantangan Implementasi (*The Challenges*):** Di sisi lain, jurnal ini mengungkap hambatan struktural yang serius.
 - *Defisit Kompetensi SDM:* Tantangan terbesar bukanlah dana, melainkan kurangnya akuntan sektor publik yang paham standar akrual yang kompleks. Banyak staf pemerintah kesulitan membedakan antara belanja modal (Capex) dan belanja operasional (Opex) sesuai standar internasional.

- *Kompleksitas IT*: IPSAS menuntut sistem teknologi informasi yang terintegrasi penuh (*Enterprise Resource Planning*). Di negara berkembang, sistem yang terfragmentasi antar kementerian membuat konsolidasi data menjadi mimpi buruk dan rentan kesalahan.
- *Resistensi Budaya*: Terdapat keengganan dari birokrat lama untuk mengubah cara kerja ("business as usual"), karena transparansi IPSAS dianggap mengancam kepentingan vested interest tertentu.

C. Kesimpulan

Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa adopsi IPSAS adalah pedang bermata dua. Meskipun menjanjikan tata kelola yang lebih baik, implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan matang justru bisa menjadi bencana administratif. Kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa "Adopsi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat." Negara berkembang tidak disarankan melakukan pendekatan "Big Bang" (berubah seketika), melainkan pendekatan bertahap (*phased approach*).

D. Daftar Pustaka

Felix, I. O., & Muritala, T. A. (2023). "*The Challenges and Benefits of Adopting International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in Emerging Economies*". *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 13(4), 789-810.
<https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2022-0145>

ANALISI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan Keuangan dan Kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan berbagai laporan pendukung lainnya. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekian persen dari anggaran yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah mencerminkan efisiensi pengelolaan dana publik. Namun, terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya peningkatan pengeluaran atau kendala dalam pengelolaan surplus anggaran. Selain itu, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menunjukkan pemanfaatan SAL untuk membiayai kebutuhan tahun anggaran berjalan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi neraca, terdapat peningkatan nilai aset pemerintah daerah yang didukung oleh pengelolaan investasi jangka panjang dan aset tetap, meskipun kewajiban juga mengalami peningkatan. Arus kas menunjukkan penurunan kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi, yang dapat menjadi indikasi perlunya optimalisasi pendapatan dan pengendalian biaya. Laporan perubahan ekuitas mengungkapkan adanya kenaikan ekuitas, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terkait efektivitas koreksi dan revaluasi aset tetap. Catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi tambahan untuk mendukung transparansi dan pemahaman pengguna terhadap laporan yang disajikan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Sumber: https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go_id.pdf



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)			2021 (Audited)
			Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.	14.367.963.003,00	14.390.450.282,00	100,16	13.052.711.728,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.2.	2.363.387.207,00	2.237.859.702,50	94,69	3.516.611.279,25
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3.	6.623.153.836,00	5.569.077.716,21	84,08	5.923.153.837,04
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.4.	50.873.650.425,00	48.117.954.932,57	94,58	49.006.415.713,30
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3 s.d. 6)		74.228.154.471,00	70.315.342.633,28	94,73	71.498.892.557,59
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.	885.633.965.767,00	870.256.487.463,00	98,26	844.790.713.397,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.2.	62.673.952.288,00	70.985.312.496,00	113,26	55.206.420.973,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 10)		948.307.921.055,00	941.241.799.959,00	99,25	899.997.134.370,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3.				
13	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	12.722.026.000,00	12.722.026.000,00	100,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	35.647.592.000,00
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s.d. 14)		12.722.026.000,00	12.722.026.000,00	100,00	35.647.592.000,00
16	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)		1.035.258.101.526,00	1.024.279.168.592,28	98,94	1.007.143.618.927,59
17	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
18	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
19	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	412.755.049.674,00	395.256.776.924,00	95,76	399.752.460.193,95
20	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	315.702.049.754,00	293.591.618.382,05	93,00	283.144.415.580,00
21	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	4.900.000.000,00	4.469.946.021,00	91,22	0,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	522.500.000,00	522.500.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	19.713.340.072,00	19.513.941.922,00	98,99	22.250.295.549,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	2.336.989.000,00	1.926.261.500,00	82,42	3.971.038.600,00
25	Jumlah Belanja Operasi (19 s.d. 24)		755.929.928.500,00	715.281.044.749,05	94,62	709.118.209.922,95
26	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	1.152.130.400,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	39.223.503.605,00	37.544.778.356,00	95,72	23.110.102.932,00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	42.061.232.252,00	41.842.220.791,00	99,48	35.286.366.461,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	121.983.640.642,00	107.650.228.900,00	88,25	68.608.479.260,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	3.839.207.700,00	3.821.418.300,00	99,54	4.092.523.453,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	702.641.575,00	702.641.575,00	100,00	0,00
33	Jumlah Belanja Modal (27 s.d. 32)		207.810.225.774,00	191.561.287.922,00	92,18	132.249.602.506,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
35	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1.	3.545.261.315,00	2.417.830.965,00	68,20	2.220.535.100,00
36	Jumlah Belanja Tidak Terduga (35)		3.545.261.315,00	2.417.830.965,00	68,20	2.220.535.100,00
37	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	1.896.020.200,00	1.475.794.900,00	77,84	1.830.761.000,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	170.854.037.000,00	170.854.037.000,00	100,00	179.898.587.000,00
40	Jumlah Belanja Transfer (38 s.d. 39)		172.750.057.200,00	172.329.831.900,00	99,76	181.729.348.000,00
41	JUMLAH BELANJA DAERAH (25+33+36+40)		1.140.035.472.789,00	1.081.589.995.536,05	94,87	1.023.317.695.528,95
42	SURPLUS / (DEFISIT) (16 - 41)	5.1.3	(104.777.371.263,00)	(57.310.826.943,77)	54,70	(18.174.076.601,36)
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1.	56.959.356.109,00	56.959.356.108,81	100,00	57.625.748.528,17
46	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2.	58.612.469.000,00	57.991.820.750,00	98,94	19.653.117.250,00
47	Jumlah Penerimaan Pembayaran (45 s.d. 46)		115.571.825.109,00	114.951.178.858,81	99,46	77.278.865.778,17
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.				
49	Penyetoran Modal Daerah	5.1.4.2.1.	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
50	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2.	8.794.453.846,00	7.466.009.725,00	84,89	145.433.068,00
51	Jumlah Pengeluaran Pembayaran (49 s.d. 50)		10.794.453.846,00	9.466.009.725,00	87,69	2.145.433.068,00
52	PEMBIAYAAN NETO (47 - 51)		104.777.371.263,00	105.485.167.133,81	100,68	75.133.432.710,17
53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (42 + 52)	5.1.5	0,00	48.174.340.190,04	0,00	56.959.356.108,81

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	56.959.356.108,81	57.625.748.528,17
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	56.959.356.108,81	57.625.748.528,17
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
5	Subtotal (3+4)		48.174.340.190,04	56.959.356.108,81
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 s.d. 7)	5.2.5.	48.174.340.190,04	56.959.356.108,81

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	48.306.801.785,85	57.344.944.695,65
4	Plutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	38.759.446,00	17.458.418,00
5	Plutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	32.894.406,00	16.553.326,00
6	Plutang Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4.	757.985.400,01	889.387.194,40
7	Plutang Lain-lain PAD yang Sisa	5.3.1.1.5.	2.514.816.022,48	12.238.659.505,00
8	Plutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6.	43.393.765,00	0,00
9	Plutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7.	16.889.268.081,00	16.103.208.709,00
10	Penyisihan Putung	5.3.1.1.8.	(3.286.394.628,18)	(1.150.575.148,85)
11	Beban Obayar Dimuka	5.3.1.1.9.	83.083.328,00	66.416.663,00
12	Persediaan	5.3.1.1.10.	10.819.935.104,05	10.688.301.653,10
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)		76.200.542.730,21	96.424.355.015,30
14	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
15	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	422.564.708,85	384.788.425,85
16	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	41.533.306.105,72	40.576.223.764,39
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 + 16)		41.955.870.814,57	40.961.012.190,24
18	ASET TETAP	5.3.1.3.		
19	Tanah	5.3.1.3.1.	653.643.184.030,00	502.263.728.483,00
20	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	459.892.185.651,89	426.501.864.880,69
21	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	906.618.832.427,34	850.227.393.539,34
22	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4.	1.981.673.833.979,07	1.914.445.760.319,07
23	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	64.487.079.796,39	60.663.607.096,39
24	Konstruksi Dalam Pengajaran	5.3.1.3.6.	1.725.150.408,00	18.640.140.508,00
25	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.526.287.811.742,86)	(1.399.995.288.015,15)
26	Nilai Buku Aset Tetap (19 s.d. 25)		2.540.752.455.849,63	2.372.746.206.811,34
27	DANA CADANGAN	5.3.1.4.		
28	Dana Cadangan	5.3.1.4.1.	0,00	0,00
29	Jumlah Dana Cadangan (28)		0,00	0,00
30	ASET LAINNYA	5.3.1.5.		
31	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1.	2.363.635.599,00	0,00
32	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	3.465.815.871,00	2.918.115.871,00
33	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	181.002.788.163,00	135.836.555.074,00
34	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4.	(2.592.834.344,00)	(2.372.025.438,00)
35	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5.	0,00	0,00
36	Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)		184.239.405.289,00	136.382.645.507,00
37	JUMLAH ASET (13+17+26+29+36)		2.843.148.274.683,41	2.646.514.219.523,88
38	KEWAJIBAN	5.3.2.		
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.3.2.1.1.	129.102.406,81	360.161.321,99
41	Utang Bunga	5.3.2.1.2.	0,00	15.449.534,00
42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3.	17.918.063.340,00	1.889.722.812,50
43	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4.	2.513.371.173,00	5.968.826.322,00
44	Utang Belanja	5.3.2.1.5.	3.551.846.971,00	9.170.087.099,00
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6.	0,00	668.075,85
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s.d. 45)		24.112.385.890,81	17.404.915.165,34
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.		
48	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1.	52.261.014.935,00	17.763.394.437,50
49	Utang kepada Masyarakat	5.3.2.2.2.	0,00	0,00
50	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (48 s.d. 49)		52.261.014.935,00	17.763.394.437,50
51	JUMLAH KEWAJIBAN (46 + 50)		76.373.400.825,81	35.168.309.602,84

Hal. 3

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
52	EKUITAS	5.3.3.		
53	EKUITAS	5.3.3.1.		
54	Ekuitas	5.3.3.1.1.	2.766.774.873.857,80	2.611.345.909.921,04
55	JUMLAH EKUITAS (54)		2.766.774.873.857,80	2.611.345.909.921,04
56	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (51 + 55)		2.843.148.274.683,41	2.646.514.219.523,88

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

 NUKMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1.		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1.		
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	14.411.751.310,00	13.010.435.157,00
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2.	2.288.335.782,50	3.493.703.195,25
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3.	5.379.691.717,82	5.703.393.908,54
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	38.248.628.564,05	57.565.944.493,18
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO (3 s.d. 6)		60.328.407.374,37	79.773.476.753,97
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2.		
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	758.238.340.039,00	713.176.618.613,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	71.771.371.868,00	52.066.236.899,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s.d. 10)		830.009.711.907,00	765.242.855.512,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3.		
13	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1.	16.914.529.726,00	31.429.359.328,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2.	0,00	35.847.592.000,00
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13 s.d. 14)		16.914.529.726,00	67.276.951.328,00
16	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO (7+11+15)		907.252.649.007,37	912.293.283.593,97
17	BEBAN DAERAH	5.4.2.		
18	BEBAN OPERASI	5.4.2.1.		
19	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	394.475.604.682,00	400.669.350.907,00
20	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2.	288.628.568.302,10	282.955.372.738,06
21	Beban Bunga	5.4.2.1.3.	4.319.006.596,00	160.882.602,00
22	Beban Subsidi	5.4.2.1.4.	522.500.000,00	0,00
23	Beban Hibah	5.4.2.1.5.	22.567.856.176,00	22.345.295.549,00
24	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6.	2.016.261.500,00	3.971.038.600,00
25	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7.	2.944.437.959,00	466.863.981,98
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8.	149.529.517.264,71	147.524.686.389,30
27	Jumlah Beban Operasi (19 s.d. 26)		865.003.752.479,81	858.093.490.767,34
28	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2.		
29	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1.	1.645.398.027,00	2.105.505.200,00
30	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2.	53.370.540.000,00	53.520.540.000,00
31	Jumlah Beban Transfer (29 s.d. 30)		55.015.938.027,00	55.626.045.200,00
32	JUMLAH BEBAN (27 + 31)		920.019.690.506,81	913.719.535.967,34
33	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI OPERASI (16-32)		(12.767.041.499,44)	(1.426.252.373,37)
34	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.		
35	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.1.		
36	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1.1.	286.438.221,00	469.716.228,00
37	Jumlah Surplus Non Operasional - LO (36)		286.438.221,00	469.716.228,00
38	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.2.		
39	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2.1.	824.764.484,00	0,00
40	Jumlah Defisit Non Operasional - LO (39)		824.764.484,00	0,00
41	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 40)		(538.326.263,00)	469.716.228,00
42	SURPLUS/DEFISIT - LO SEBELUM POS LUAR BIASA (33+41)		(13.305.367.762,44)	(956.536.145,37)
43	POS LUAR BIASA	5.4.4.		
44	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.4.4.1.		
45	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1.1.	0,00	0,00
46	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO (45)		0,00	0,00
47	BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2.		
48	Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1.	4.545.745.422,00	5.255.374.602,00
49	Jumlah Beban Luar Biasa - LO (48)		4.545.745.422,00	5.255.374.602,00
50	JUMLAH POS LUAR BIASA (46 - 49)		(4.545.745.422,00)	(5.255.374.602,00)
51	SURPLUS/DEFISIT-LO (42 + 50)		(17.851.113.184,44)	(6.211.910.747,37)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

P.J. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.	14.390.450.282,00	13.052.711.728,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.2.	2.237.859.702,50	3.516.611.279,25
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.3.	5.569.077.716,21	5.923.151.837,04
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.4.	47.255.388.541,57	49.008.415.713,30
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.5.	870.255.467.463,00	844.790.711.397,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1.6.	70.985.312.956,00	55.206.420.973,00
9	Penerimaan Hibah	5.5.1.7.	12.722.028.000,00	0,00
10	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.8.	0,00	35.647.592.000,00
11	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 10)		1.023.456.602.230,28	1.007.143.818.927,59
12	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
13	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.	398.256.776.594,00	399.752.460.153,95
14	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2.	293.591.618.382,05	283.144.415.586,00
15	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3.	4.469.946.021,00	0,00
16	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.4.	522.500.000,00	0,00
17	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.5.	19.513.941.922,00	22.250.254.549,00
18	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.6.	1.926.291.500,00	3.971.036.600,00
19	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.7.	1.475.794.900,00	1.830.761.000,00
20	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8.	170.854.037.000,00	179.898.587.000,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.9.	2.417.830.965,00	2.220.538.100,00
22	Jumlah Arus Keluar Kas (13 s.d. 21)		890.028.787.414,85	893.068.093.022,45
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11 - 22)		133.427.894.587,23	114.075.525.904,64
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.		
25	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
26	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1.	538.773.904,00	0,00
27	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.2.	263.792.457,00	0,00
28	Jumlah Arus Masuk Kas (26 s.d. 27)		822.566.391,00	0,00
29	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
30	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1.	0,00	1.152.130.400,00
31	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2.	37.544.778.356,00	23.110.102.932,00
32	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3.	41.842.220.791,00	35.286.365.461,00
33	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Igasi	5.5.2.2.4.	107.650.228.900,00	68.608.479.260,00
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5.	3.821.418.300,00	4.092.523.453,00
35	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6.	702.641.575,00	0,00
36	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7.	2.000.000.000,00	0,00
37	Jumlah Arus Keluar Kas (30 s.d. 36)		193.561.287.922,00	132.249.802.506,00
38	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (28 - 37)		(192.738.721.531,00)	(132.249.802.506,00)
39	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.		
40	Arus Masuk Kas	5.5.3.1.		
41	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaaga Keuangan Bumik Bank	5.5.3.1.1.	57.991.820.750,00	19.653.117.250,00
42	Jumlah Arus Masuk Kas (41)		57.991.820.750,00	19.653.117.250,00
43	Arus Keluar Kas	5.5.3.2.		
44	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1.	0,00	2.000.000.000,00

Hal. 6

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
45	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaaga Keuangan Bumik Bank	5.5.3.2.2.	7.466.009.725,00	145.433.068,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s.d. 45)		7.466.009.725,00	2.145.433.068,00
47	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (42 - 46)		50.525.811.025,00	17.507.684.182,00
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.		
49	Arus Keluar Kas	5.5.4.1.		
50	Pengeluaran Pengembangan Fakta Ketiga (PKF)	5.5.4.1.1.	64.168.462.070,48	56.752.572.539,39
51	Penerimaan Pengembangan Fakta Ketiga (PKF)	5.5.4.1.2.	0,00	668.075,85
52	Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.1.3.	21.400.000,00	200.000.000,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s.d. 52)		64.168.462.070,48	56.953.440.615,24
49	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
55	Pengeluaran Pengembangan Fakta Ketiga (PKF)	5.5.4.2.1.	64.399.520.985,66	56.610.216.203,40
56	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.2.2.	668.075,85	0,00
57	Pengeluaran Dara BOS Afirmai dan BOS Kneja	5.5.4.2.3.	21.400.000,00	178.600.000,00
58	Penyerahan Saldo Kas Bansos ke Kas Daerah	5.5.4.2.4.	0,00	31.931.116,12
59	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 59)		64.421.509.061,51	56.820.747.313,52
60	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (53 - 59)		(251.126.991,03)	132.493.301,72
61	Kenaikan/Penurunan Kas (23 + 28 + 47 + 60)		(9.038.142.309,80)	(533.899.117,64)
62	Saldo Awal Kas		57.344.944.695,65	57.878.843.813,29
63	Saldo Akhir Kas (61 + 62)		48.306.801.785,85	57.344.944.695,65
64	Saldo Akhir Kas di Dinas Daurul	5.5.5.	44.640.582.801,71	49.699.699.808,70
65	Saldo Akhir Kas di Benda/Harana Penerimaan	5.5.5.	0,00	2.605.000,00
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengetaran	5.5.5.	61.075,00	7.250.000,00
67	Saldo Akhir Kas di BLUD	5.5.5.	3.452.121.126,70	6.971.249.336,13
68	Saldo Akhir Kas Dara BOS	5.5.5.	214.036.782,44	550.968.256,62
69	Saldo Akhir Kas Dara Kapitalis pada FKTP	5.5.5.	0,00	69.111.043,20
70	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.	0,00	43.723.882,00
71	Saldo Akhir Kas (64 s.d. 70)		48.306.801.785,85	57.344.944.695,65

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	2.611.345.909.921,04	2.625.399.058.375,26
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	(17.851.113.184,44)	(6.211.910.747,37)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	5.6.4.	153.491.968.983,00	0,00
6	Lain-lain	5.6.5.	19.788.108.138,00	(7.841.237.706,85)
7	EKUITAS AKHIR		2.766.774.873.857,60	2.611.345.909.921,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	2.611.345.909.921,04	2.625.399.058.375,26
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	(17.851.113.184,44)	(6.211.910.747,37)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	5.6.4.	153.491.968.983,00	0,00
6	Lain-lain	5.6.5.	19.788.108.138,00	(7.841.237.706,85)
7	EKUITAS AKHIR		2.766.774.873.857,60	2.611.345.909.921,04

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



